

**PELAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO TAHUN 2025
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN**



KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Raya Karangbinangun Nomor 22, Kode Pos 62293
Telepon (0322) 3382620, e-mail: karangbinangun@lamongankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jalan Raya Karangbinangun Nomor 22, Kode Pos 62293
Telepon (0322) 3382620, e-mail: karangbinangun@lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	800 / 26 / 413.324/2025
TANGGAL TERBIT	:	24 Januari 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  BIYANTO, S.E. NIP. 196809192009061001 Anggota
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN KARANGBINANGUN  KIYAT, S.E. NIP. 197212172007011013 Koordinator
Disahkan Oleh	:	CAMAT KARANGBINANGUN  DIAN SUKMANA, S.STP., M.Si. NIP. 198210082001121002 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan

menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.

Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan, sehingga di perlukan manajemen resiko yang baik sehingga dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang terjadwal serta terwujudnya pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan atau good government

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

a. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Lingkungan pengendali adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap oragnaisi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar system pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan system pengendalian intern yaitu :

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pedelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

b. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Sebagai pelaksana pengendalian intern, telah di terbitkan Surat Keputusan Camat Karangbinangun Kabupaten Lamongan tanggal 29 Desember 2023 nomor : 188/59/413.324/2023 tentang pembentukan tim Satuan Tugas system pengendalian intern Pemerintah tahun 2024. Terdapat 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas yaitu:

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)
2. Risk Assessment (Penilaian Resiko)
3. Control Activities (Kegiatan Pengendalian)
4. Information & Communication (Informasi dan Komunikasi)
5. Monitoring (Pemantauan)

III. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendali

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penetapan konteks dilakukan meliputi penentuan unit pemilik resiko, sasaran yang akan dikelola resikonya, horizon waktu resiko yang akan dikelola dan penerapan kreteria untuk menganalisa resiko dan evaluasi resiko, adapun sasaran yang dikelola resiko nya sesuai dengan rencana strategis 2021 s.d 2026 meliputi :

1. Meningkatkan manajemen internal Perangkat Daerah
2. Meningkatkan pemberdayaan Desa

Sedangkan horizon waktu resiko merupakan tahunan atau sesuai tahun anggaran.

B. Hasil Identifikasi Resiko

identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan-kemungkinan atau kejadian- kejadian yang berpotensi menghambat atau

menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan setiap kegiatan utama. Sumber data yang digunakan dalam Identifikasi Risiko adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 adapun hasil identifikasi sebagaimana berikut :

Tabel 1
Kertas Kerja Strategis OPD
Kecamatan Karangbinangun

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.25.99.43.01	Camat	1. Kurang maksimalnya Pelaporan yang dibuat 2. Sinergitas antar seksi kurang maksimal	Internal	C	1. Kualitas dan efektivitas pelayanan rendah 2. Kepuasan masyarakat menurun	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah kabupaten lamongan
2	Jumlah Desa Maju	Indek Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.25.99.43.02	Camat	Komitmen Desa terhadap Peningkatan Status desa Rendah	Internal	C	Tidak Ada Desa yang naik kelas menjadi Desa Maju	Desa, kecamatan karangbinangun, pemerintah kabupaten lamongan

Tabel 2
Kertas Kerja Operasional OPD
Kecamatan Karangbinangun

No	Kegiatan	Indikator Keuaran	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang Terlaksanakan	Perencanaan	Tidak Terlaksanakannya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dengan baik	ROO.25.99.43.01	Camat/ Sekretaris Kecamatan	SDM yang kurang ber wawasan	Internal	C	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kurang tepat	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah kabupaten lamongan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksanakan dengan	Pelaksanaan	Pengadministrasian Keuangan tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.02	Camat/ Sekretaris Kecamatan	pembagian tugas kerja tidak merata	Internal	C	Gaji dan Tunjangan tidak bisa tersalurkan	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terlaksanakan	Pelaksanaan	Pengadministrasian Umum yang tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.03	Camat/ Sekretaris Kecamatan	Kurangnya Personil	Internal	C	Kegiatan Penunjang Operasional kecamatan Tidak Berjalan dengan baik	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah kabupaten lamongan	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pelaksanaan	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.04	Camat/ Sekretaris Kecamatan	Kurangnya Personil	Internal	C	Kegiatan Penunjang Operasional kecamatan Tidak Berjalan dengan baik	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah kabupaten lamongan	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Pelaksanaan	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.05	Camat/ Sekretaris Kecamatan	Kurangnya Personil	Internal	C	Kegiatan Penunjang Operasional kecamatan Tidak Berjalan dengan baik	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah kabupaten lamongan	
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase Layanan Publik yang Terlaksanakan	Pelaksanaan	Layanan Publik yang tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.06	Camat/ sekcami/ Kepala Seksi Pelayanan Publik	1. Kurangnya Personil 2. Jaringan internet sering trobl	Internal	C	Kurang maksimalnya Pelayanan Publik	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah	
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase Layanan Publik yang Terlaksanakan	Pelaksanaan	Pemintaan imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan	ROO.25.99.43.07	Camat/ sekcami/ Kepala Seksi Pelayanan Publik	Kurangnya integritas Petugas Pelayanan	Internal	C	Pelayanan tidak sesuai SOP	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah	
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan yang terlaksanakan	Pelaksanaan	Tidak Maksimalnya Pemberdayaan yang terlaksanakan	ROO.25.99.43.08	Camat/ Kepala Seksi PPM	SDM Kurang Kompeten	Internal	C	Pemberdayaan desa sulit dilaksanakan	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah	
9	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Persentase terlaksananya peningkatan ketahanan	Pelaksanaan	Tidak Maksimalnya peningkatan ketahanan pangan keluarga	ROO.25.99.43.09	Camat/ Kepala Seksi PPM	Kurang maksimalnya koordinasi dengan desa	Internal	C	Kesejahteraan keluarga di lindungi kecamatan rendah	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah	
10	koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Pelaksanaan	Tidak Maksimalnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	ROO.25.99.43.10	Camat/ Kepala Seksi Ketertiban dan Kelermban	Kurangnya Aktifitas koordinasi yang dilakukan	Internal	C	Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak berjalan sesuai yang diinginkan	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah	
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah yang tidak Maksimalnya koordinasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan	Tidak Maksimalnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah yang tidak Maksimalnya koordinasi	ROO.25.99.43.11	Camat/ Kepala Seksi Pemerintahan	Kurangnya koordinasi	Internal	C	Kegiatan tidak berjalan maksimal	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah	
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Pelaksanaan	Tidak Maksimalnya koordinasi, fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	ROO.25.99.43.12	Camat/ Kepala Seksi Pemerintahan	Tingkat kedisiplinan Perangkat rendah	Internal	C	Sulit melakukan pembinaan dan pengawasan	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah	

A. Hasil Analisis Resiko

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah diidentifikasi serta Rencana tindak pengendalian resiko (RTP)

Tabel 3
Hasil Analisis Risiko
Kecamatan Karangbinangun

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Kecamatan Karangbinangun	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.25.99.43.01	4	Camat	1. Kurang maksimalnya Pelaporan yang dibuat 2. Sinergitas antar seksi kurang maksimal	1. Kualitas dan efektivitas pelayanan rendah 2. Kepuasan masyarakat menurun
2	Kecamatan Karangbinangun	Indek Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.25.99.43.02	7	Camat	Komitmen Desa terhadap Peningkatan Status desa Rendah	Tidak Ada Desa yang naik kelas menjadi Desa Maju

Risiko Operasional OPD							
1	Kecamatan Karangbinan	Tidak Terlaksanakannya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dengan baik	ROO.25.99.4 3.01	1	Camat/ Sekretaris Kecamatan	SDM yang kurang berwawasan	Perencanaan kurang tepat
2	Kecamatan Karangbinan	Pengadministrasian Keuangan tidak tepat waktu	ROO.25.99.4 3.02	1	Camat/ Sekretaris Kecamatan	Jaringan internet sering trouble	Gaji dan Tunjangan tidak bisa tersalurkan
3	Kecamatan Karangbinan	Pengadministrasian Umum yang tidak tepat waktu	ROO.25.99.4 3.03	1	Camat/ Sekretaris Kecamatan	Kurangnya Personil	Kegiatan tidak berjalan maksimal
4	Kecamatan Karangbinan	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tepat waktu	ROO.25.99.4 3.04	1	Camat/ Sekretaris Kecamatan	Kurangnya Personil	Kegiatan tidak berjalan maksimal
5	Kecamatan Karangbinan	Pemeliharaan barang milik daerah penjunagan urusan pemerintahan tidak tepat waktu	ROO.25.99.4 3.05	1	Camat/ Sekretaris Kecamatan/Kasubbag umum dan kepegawaian	Kurangnya Personil	Kegiatan tidak berjalan maksimal
6	Kecamatan Karangbinan	Layanan Publik yang tidak tepat waktu	ROO.25.99.4 3.06	1	Camat/ Kepala Seksi Pelayanan Publik	1. Jaringan internet sering trouble 2. Kurangnya personil	Kurang maksimalnya Pelayanan Publik
7	Kecamatan Karangbinan	Tidak Maksimalnya Pemberdayaan yang terlaksanakan	ROO.25.99.4 3.07	1	Camat/ Kepala Seksi PPM		Pemberdayaan sulit dilakukan
8	Kecamatan Karangbinan	Tidak Maksimalnya peningkatan ketahanan pangan keluarga	ROO.25.99.4 3.8	1	Camat/ Kepala Seksi PPM		Kesejahteraan keluarga dilingkup kecamatan rendah
9	Kecamatan Karangbinan	Tidak Maksimalnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	ROO.25.99.4 3.9	1	Camat/ Kepala Seksi Trantib	Kurangnya Aktifitas koordinasi yang dilakukan	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tidak

						berjalan sesuai yang diinginkan
1 0	Kecamatan Karangbinangun	Tidak Maksimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	ROO.25.99.4 3.10	1 Camat/ Kepala Seksi Pemerintahan	Kurangnya koordinasi	Kegiatan tidak berjalan maksimal
1 1	Kecamatan Karangbinangun	Tidak Maksimalnya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	ROO.25.99.4 3.11	1 Camat/ Kepala Seksi Pemerintahan	Tingkat kedisiplinan Perangkat rendah	Sulit melakukan pembinaan dan pengawasan

A. Pengendalian Yang sudah dilaksanakan

Hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Kecamatan Karanggeneng pelaksanaan pengendalian sebagai langkah startegis sebagai bahan dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP adapun tabel kegiatan yang telah di laksanakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Pengendalian yang sudah dilaksanakan

N o	Resiko Prioritas	Kode resiko	Uraian Pengenda lian yang Sudah Ada	Celah Pengendali an	Rencana Tindak Pengend alian	Pemilik/ Penang ungg Jawab	Target Waktu Penyeye saian
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karangbinangun:							
1	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.25.9 9.43.01	Rapat Koordinasi Manajemen Kinerja	Terdapat pegawai yang kurang memahami Manajemen Kinerja	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Camat	Maret
2	Indek Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.25.99. 43.02	Rapat Koordinasi dengan Desa dan Pendamping Desa	Terdapat Desa yang kurang memahami Manajemen Desa	Melakukan Koordinasi/ Sosialisasi Manajemen Desa	Camat	Maret

Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:							
1	Tidak Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dengan baik	ROO.25.9 9.43.01	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Personil	Penunjukan Tim kerja	Camat/Sekretaris Kecamatan	Januari

2	Pengadministrasian Keuangan tidak tepat waktu	ROO.25.9 9.43.02	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Personil	Penunjukan Tim kerja	Camat/Sekretaris Kecamatan	Januari
3	Pengadministrasian Umum yang tidak tepat waktu	ROO.25.9 9.43.03	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Personil	Penunjukan Tim kerja	Camat/Sekretaris Kecamatan	Januari
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tepat waktu	ROO.25.9 9.43.04	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Personil	Penunjukan Tim kerja	Camat/Sekretaris Kecamatan	Januari
5	Pemeliharaan barang milik daerah penjunangan urusan pemerintahan tidak tepat waktu	ROO.25.9 9.43.05	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Personil	Penunjukan Tim kerja	Camat/Sekretaris Kecamatan	Januari

6	Layanan Publik yang tidak tepat waktu	ROO.25.9 9.43.06	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Personil	Penunjukan Tim kerja	Camat/Kepala seksi Pelayanan	Januari
7	Tidak Maksimalnya Pemberdayaan yang terlaksanaan	ROO.25.9 9.43.07	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurang kompeten aparatur desa	Melakukan Pembinaan	Camat/kepala Seksi PPM	Januari - Desember
8	Tidak Maksimalnya peningkatan ketahanan pangan keluarga	ROO.25.9 9.43.8	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya kopenten sdm yang menangani	Melakukan pembinaan	Camat/kepala Seksi PPM	Januari - Desember
9	Tidak Maksimalnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	ROO.25.9 9.43.9	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya koordinasi vertikal	Melakukan koordinasi yang tepat	Camat/kepala Seksi Trantibbu	Januari - Desember

10	Tidak Maksimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	ROO.25.9 9.43.10	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Desa	Melakukan pembinaan	Camat/kepala Seksi pemerintahan	Januari - Desember
11	Tidak Maksimalnya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	ROO.25.9 9.43.11	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Desa		Camat/kepala Seksi pemerintahan	Januari - Desember

B. Pengendalian yang di butuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 5
Pengendalian yang dibutuhkan

No	Resiko Prioritas	Kode resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
----	------------------	-------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

Risiko Strategis OPD Kecamatan Karagbinangun:							
1	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.25.9 9.43.01	Rapat Koordinasi Manajemen Kinerja	Terdapat pegawai yang kurang memahami Manajemen Kinerja	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Camat	Maret
2	Indek Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.25.99. 43.02	Rapat Koordinasi dengan Desa dan Pendamping Desa	Terdapat Desa yang kurang memahami Manajemen Desa	Melakukan Koordinasi/ Sosialisasi Manajemen Desa	Camat	Maret

Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:							
1	Tidak Terlaksanakannya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dengan baik	ROO.25.9 9.43.01	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Personil	Penunjukan Tim kerja	Camat/Sekretaris Kecamatan	Januari
2	Pengadministrasian Keuangan tidak tepat waktu	ROO.25.9 9.43.02	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Personil	Penunjukan Tim kerja	Camat/Sekretaris Kecamatan	Januari

3	Pengadministrasian Umum yang tidak tepat waktu	ROO.25.9 9.43.03	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Personil	Penunjukan Tim kerja	Camat/Sekretaris Kecamatan	Januari
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tepat waktu	ROO.25.9 9.43.04	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Personil	Penunjukan Tim kerja	Camat/Sekretaris Kecamatan	Januari
5	Pemeliharaan barang milik daerah penjunangan urusan pemerintahan tidak tepat waktu	ROO.25.9 9.43.05	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Personil	Penunjukan Tim kerja	Camat/Sekretaris Kecamatan	Januari
6	Layanan Publik yang tidak tepat waktu	ROO.25.9 9.43.06	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Personil	Penunjukan Tim kerja	Camat/Kepala seksi Pelayanan	Januari

7	Tidak Maksimalnya Pemberdayaan yang terlaksanakan	ROO.25.9 9.43.07	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurang kompeten aparaturnya desa	Melakukan Pembinaan	Camat/kepala Seksi PPM	Januari - Desember
8	Tidak Maksimalnya peningkatan ketahanan pangan keluarga	ROO.25.9 9.43.8	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya kompetensi sdm yang menangani	Melakukan pembinaan	Camat/kepala Seksi PPM	Januari - Desember
9	Tidak Maksimalnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	ROO.25.9 9.43.9	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya koordinasi vertikal	Melakukan koordinasi yang tepat	Camat/kepala Seksi Trantibbu	Januari - Desember
10	Tidak Maksimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	ROO.25.9 9.43.10	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Desa	Melakukan pembinaan	Camat/kepala Seksi pemerintahan	Januari - Desember

11	Tidak Maksimalnya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	ROO.25.9 9.43.11	Monitoring dan evaluasi kegiatan SOP yang ada	Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Desa		Camat/kepala Seksi pemerintahan	Januari - Desember
----	--	---------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------

A. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Pada bab ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang di butuhkan agar pihak pihak terlibat dalam pengendalian resiko serta keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan sebagaimana tabel di bawah

Tabel 6
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karangbinangun:				
1	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
2	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa secara Berkala	Camat	Januari - Desember 2025
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:				
1	Penunjukan Pejabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Camat	Januari
2	Penunjukan Pejabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Camat	Januari
3	Pembinaan dan Evaluasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025

4	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
5	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara	Camat	Januari - Desember 2025

		berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll		
6	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
7	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
8	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025
9	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK dan Mengembangkan Inovasi	Camat	Januari 2025
10	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025
11	Peningkatan Intensitas Pendampingan dalam pelaksanaan perencanaan pelaksanaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
12	Pembinaan, Bimtek Anggota PKK Kecamatan dan Desa	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
13	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025
14	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025
15	Pembinaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025

16	Pembinaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
----	-----------	--	-------	-------------------------

B. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa resiko dapat di pantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dan berjalan efektif sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 7
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karangbinangun:						
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemantauan Nilai SAKIP	Camat	Maret		
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Berita Acara Penetapan Status Desa	Camat	Maret		

Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:						
1	Penunjukan Pejabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Camat	Januari		
2	Penunjukan Pejabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Camat	Januari		
3	Pembinaan dan Evaluasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025		
4	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025		
5	Pembinaan dan	dilaksanakan Pembinaan secara	Camat	Januari - Desember		

	Evaluasi			er 2025		
		berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll				
6	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025		
7	Pembinaan dan Evaluas	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025		
8	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025		
9	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK dan Mengembangkan Inovasi	Camat	Januari 2025		
10	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025		
11	Peningkatan Intensitas Pendampingan dalam pelaksanaan perencanaan pelaksanaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025		
12	Pembinaan, Bimtek Anggota PKK Kecamatan dan Desa	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025		
13	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025		
14	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025		
15	Pembinaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025		
16	Pembinaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025		

C. Penutup

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan dan pesatnya perkembangan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi dan globalisasi memunculkan potensi-potensi risiko yang baru dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penyusunan menyadari masih banyak yang harus disempurnakan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan Kecamatan Karangbinangun.

CAMAT KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN


DIAN SUKMANA, S.STP.,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19821008 200112 1 002